



~ Sistem Politik Indonesia

Suhardiman
Jamiah



SISTEM POLITIK INDONESIA

Suhardiman
Jamiah



Tahta Media Group

UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka pelindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan

: EC002026012554, 21 Januari 2026

Pencipta

Nama

: Dr. Suhardiman, S.Sos.,M.Si dan Jamiah, S.Sos.,M.Si

Alamat

: JL. Kadrie Oening Gang Rejeki RT.32 RW.007, Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, 75214

Kewarganegaraan

: Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama

: Dr. Suhardiman, S.Sos.,M.Si dan Jamiah, S.Sos.,M.Si

Alamat

: JL. Kadrie Oening Gang Rejeki RT.32 RW.007, Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, 75214

Kewarganegaraan

: Indonesia

Jenis Ciptaan

: Buku

Judul Ciptaan

: Sistem Politik Indonesia

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia

: 21 Januari 2026, di Kab. Sukoharjo

Jangka waktu perlindungan

: Berlaku selama hidup Pencipta dan tentu berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

: 001089299

Nomor Pencatatan

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon. Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n. MENTERI HUKUM
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
u.b
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

Agung Damarsasongko, SH.,MH.
NIP. 196912261994031001



Disclaimer:

1. Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang akan mencabut surat pencatatan permohonan.
2. Surat Pencatatan ini telah disegel secara elektronik menggunakan segel elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara.
3. Surat Pencatatan ini dapat dibuktikan keasliannya dengan memindai kode QR pada dokumen ini dan informasi akan ditampilkan dalam browser.

SISTEM POLITIK INDONESIA

Penulis:
Suhardiman
Jamiah

Desain Cover:
Tahta Media

Editor:
Tahta Media

Proofreader:
Tahta Media

Ukuran:
viii, 216, Uk: 15,5 x 23 cm

ISBN: 978-634-262-130-1

Cetakan Pertama:
Januari 2026

Hak Cipta 2026, Pada Penulis

Isi diluar tanggung jawab percetakan

Copyright © 2026 by Tahta Media Group
All Right Reserved

PENERBIT TAHTA MEDIA GROUP

Perumahan Mitra Utama Residence 3 Blok A no 1, Sawahan, Tempel,
Kec. Gatak, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah 57557

email: tahtaliterasimedia@gmail.com
website: <http://store.tahtamedia.co.id/>

Anggota IKAPI (216/JTE/2021)

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah saya ucapan kepada Allah SWT. Karena dengan Rahmat-Nya sehingga penyusunan buku sistem politik Indonesia dapat terselesaikan.

Buku Sistem politik Indonesia untuk mahasiswa ini dimaksudkan sebagai bahan panduan bagi mahasiswa semua program studi Administrasi Publik. Buku sistem politik Indonesia terdiri dari 12 bab meliputi pengantar sistem politik, struktur sistem politik, fungsi sistem politik, budaya politik indonesia, birokrasi politik, kelompok kepentingan, demokrasi, masyarakat madani, badan legislatif, badan ekskutif, badan yudikatif, dan reformasi sistm dan kelembagaan negara. Buku sistem politik Indonesia diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan acuan dan referensi para praktisi, akademisi dan mahasiswa.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan saran dan masukan sehingga buku sistem politik Indonesia dapat terselesaikan dan penulis masih mengharapkan kritik dan saran demi penyempurnaan penyusunan buku ini dimasa mendatang.

Semoga buku sistem politik Indonesia ini dapat bermanfaat bagi para praktisi, akademisi dan khususnya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Administrasi Publik. Selamat belajar, dan semoga sukses.

20 Januari 2026

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	vi
BAB 1 PENGANTAR SISTEM POLITIK INDONESIA	1
A. Pengertian Sistem	1
B. Pengertian Politik	4
C. Pengertian Sistem Politik	9
D. Manfaat Penggunaan Teori Sistem Politik	14
E. Operasionalisasi Sistem politik	19
F. Ciri-Ciri Sistem politik	20
G. Sejarah Sistem Politik Indonesia	21
BAB II STRUKTUR SISTEM POLITIK	24
A. Pengertian Struktur Politik	24
B. Hubungan Suprastruktur Politik dan Inprastruktur Politik	33
C. Struktur Politik Formal.....	35
D. Struktur Politik Informal	41
E. Pendekatan Sistem Politik	48
F. Kapabilitas Sistem Politik	50
BAB III FUNGSI SISTEM POLITIK.....	83
A. Fungsi Sosialisasi politik.....	83
B. Fungsi Rekruitmen Politik.....	86
C. Komunikasi Politik.....	88
D. Fungsi Input Sistem Politik Indonesia.....	94
E. Fungsi Output Sistem Politik.....	96
F. Pendidikan Politik	97
BAB IV BUDAYA POLITIK INDONESIA	100
A. Pengertian Budaya Politik	100
B. Tipe Budaya Politik.....	104
C. Sosialisasi Politik	111
D. Budaya Politik Indonesia.....	113
E. Budaya politik Era Reformasi	121
BAB V BIROKRASI POLITIK	129
A. Sejarah Munculnya Konsep Birokrasi Politik	129
B. Pengertian Birokrasi	130
C. Karakteristik Birokrasi	131

D.	Tipe Ideal Birokrasi.....	132
E.	Etika Birokrasi.....	136
F.	Pelaksanaan Etika Birokrasi	137
G.	Pelaksanaan Birokrasi Indonesia.....	139
H.	Kesatuan Persepsi tentang Misi Birokrasi	140
I.	Pengembangan Citra.....	150
BAB VI KELOMPOK KEPENTINGAN		152
A.	Pengertian	152
B.	Latarbelakang	152
C.	Saluran Kelompok Kepentingan.....	153
D.	Tujuan Interst Grouf (Kelompok Kepentingan)	154
E.	Sifat dan Klasifikasi Interst Grouf (Kelompok Kepentingan).....	154
BAB VII DEMOKRASI.....		156
A.	Pengertian	156
B.	Unsur Penegak Demokrasi	157
C.	Model-model Demokrasi.....	158
D.	Parameter Negara Demokrasi.....	159
E.	Perkembangan Demokrasi di Indonesia	159
F.	Transisi menuju Demokrasi.....	163
G.	Beberapa Kendala Proses Transisi Demokrasi.....	167
H.	Konsep Partisipasi Demokrasi.....	168
I.	Kehidupan Bernegara yang Demokratis.....	171
J.	Manfaat Demokrasi	173
BAB VIII MASYARAKAT MADANI		175
a.	Pengertian	175
B.	Latar Belakang.....	176
C.	Sejarah Masyarakat Madani	177
D.	Ciri-Ciri Masyarakat Madani	178
E.	Menjadi Masyarakat Madani di Indonesia	179
F.	Karakteristik Masyarakat Madani	183
G.	Pilar Penegak Masyarakat Madani di Indonesia.....	184
H.	Masyarakat Madani di Indonesia.....	185
BAB IX BADAN LEGISLATIF		187
A.	Latar Belakang.....	187
B.	Pengertian	187
C.	Sejarah Legislatif.....	187

D.	Konsep Perwakilan.....	187
E.	Fungsi Badan Legislatif.....	188
BAB X BADAN EKSEKUTIF	190	
A.	Latar Belakang.....	190
B.	Pengertian.....	190
C.	Tugas dan Wewenang Badan Eksekutif.....	191
D.	Klasifikasi Sistem Badan Eksekutif	192
BAB XI LEMBAGA YUDIKATIF	194	
A.	Latar Belakang.....	194
B.	Pengertian.....	194
C.	Sistem Badan Yudikatif dalam Negara Demokratis.....	194
D.	Kekuasaan Badan Yudikatif di Indonesia	195
E.	Badan Yudikatif dalam Era Reformasi di Indonesia	195
F.	Badan Yudikatif di Indonesia	196
BAB XII REFORMASI SISTEM DAN KELEMBAGAAN NEGARA ..	208	
A.	Negara yang Kuat.....	208
B.	Tiga Sumber penyakit negara.....	209
C.	Reformasi Sistem Pengawasan Nasional.....	211
DAFTAR PUSTAKA.....	212	
PROFIL PENULIS	216	

BAB 1

PENGANTAR SISTEM POLITIK INDONESIA

A. PENGERTIAN SISTEM

Secara Etimologis, Sistem politik Indonesia berasal dari tiga kata yaitu sistem, politik dan Indonesia. Sistem berasal dari bahasa Yunani yaitu “*sistema*” yang berarti:

1. Suatu keseluruhan yang tersusun dari sekian banyak bagian (Shrode dan Voich, 1979:P.4)
2. Hubungan yang berlangsung di antara satuan-satuan atau komponen secara teratur (Awad, 1979:P.4)

Jadi dengan kata lain “*Sistema*” itu mengandung arti sehimpunan bagian atau komponen yang saling berhubungan secara teratur dan merupakan satu keseluruhan (a whole).

Dalam perkembangan istilah itu kemudian mengalami pembiasaan sehingga memiliki banyak arti, tergantung pada obyek dan cakupan pembicaraan. Tetapi tiap defenisi mewujudkan gagasan dari sekelompok obyek atau unsur yang berada di dalam hubungan struktural karakteristik masing-masing dan satu sama lain berinteraksi dengan karakteristik tertentu.

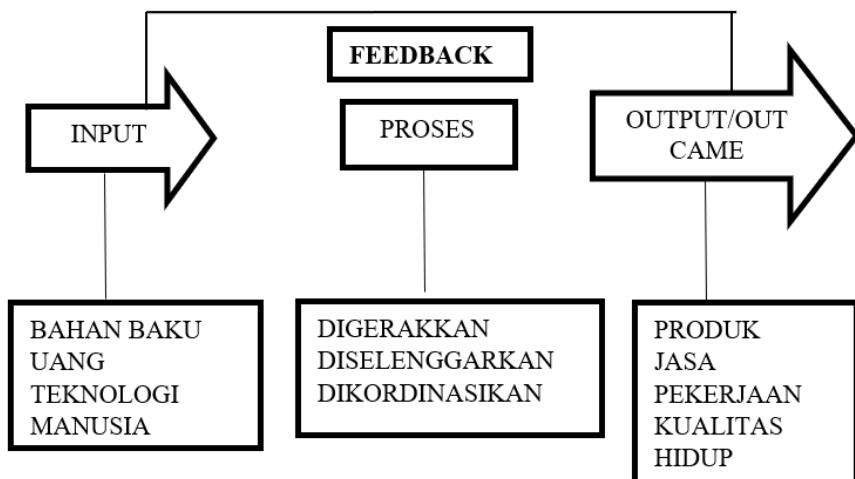
Istilah sistem sebenarnya diadopsi secara analogi dari biologi dan ilmu alam, seperti misalnya:

1. Sistem peredaran darah
2. Sistem tatasurya
3. Sistem syaraf

Sistem tatasurya misalnya diartikan sebagai mekanisme yang konsisten dari unsur-unsurnya seperti diketahui, matahari dikelilingi oleh sembilan planet. Sembilan planet tersebut, antara lain bumi, mengintari matahari secara

ritmik menurut hukum tertentu, sehingga terjadi ketertiban dan keteraturan. Satu sama lain berfungsi sehingga tidak menyimpang dari jalannya.

Proses Sebagai Sebuah Sistem



Beberapa para ahli yang mengemukakan defenisi sistem, adalah antara lain:

- Menurut Campbell (1979:3). Sistem adalah himpunan komponen atau bagian yang saling berkaitan yang bersama-sama berfungsi untuk mencapai sesuatu tujuan.
- Awad (1979:4), lebih menekankan memasukkan unsur rencana didalamnya, sehingga sistem adalah sehimpunan komponen atau sub sistem yang terorganisasikan dan berkaitan sesuai dengan rencana untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu
- Konontz dan O'Donnell (1976:14), sistem adalah bukan wujud fisik, melainkan ilmu pengetahuan juga disebut sebagai suatu sistem yang terdiri dari fakta, prinsip, doktrin dan sejenisnya.

Sistem adalah suatu kesatuan unit yang utuh (*an integrated whole*) yang terdiri atas subsistem-subsistem atau unsur-unsur sistem, dimana tiap subsistem memiliki fungsi tertentu, dan didalam mekanisme kerja subsistem itu saling berhubungan satu dengan lainnya.

1. Ciri-Ciri Sistem

Menurut Elias M. Awad (1979:5-8), menyebutkan bahwa ciri-ciri sistem meliputi:

- a. Terbuka
- b. Terdiri dari dua atau lebih subsistem
- c. Saling ketergantungan
- d. Kemampuan menyusaikan diri dengan lingkungannya
- e. Kemampuan untuk mengatur diri sendiri
- f. Tujuan dan sasaran

Secara sederhana, sistem merupakan sehimpunan unsur yang berkaitan untuk mencapai tujuan bersama. Pengertian ini dapat digambarkan dengan beberapa contoh sistem, unsur, dan tujuannya seperti yang terlihat pada bagan berikut (berdasarkan Mudrick dan Ross, 1982 dan Bagan, Sistem, unsur-unsur dan tujuannya).

Sistem	Unsur-unsur	Tujuan
Tubuh	Organ-organ, Kerangka	homeostasis
Negara	Legislatif, eksekutif, Yudikatif	Kesejahteraan
DPR	Anggota, Perlengakapan bangunan, PNS	Undang-undang

a. Ciri-Ciri Sistem

Menurut Elias M. Awad (1979:5-8), menyebutkan bahwa ciri-ciri sistem meliputi:

- 1) Terbuka
- 2) Terdiri dari dua atau lebih subsistem
- 3) Saling ketergantungan Manfaat Penyusunan Teori Sistem
- 4) Kemampuan menyusaikan diri dengan lingkungannya
- 5) Kemampuan untuk mengatur diri sendiri
- 6) Tujuan dan sasaran

b. Ciri-ciri pokok dari sistem

Sistem mempunyai ciri pokok sebagai berikut :

- 1) Setiap sistem mempunyai tujuan
- 2) Setiap sistem mempunyai batas
- 3) Walaupun terbatas sistem memiliki sifat terbuka dalam arti berinteraksi dengan lingkungannya

- 4) Suatu sistem terdiri dari berbagai unsur atau komponen (sub sistem) yang salin tergantung dan berhubungan
- 5) Setiap sistem melakukan kegiatan atau proses transformasi atau proses mengubah masukan menjadi keluaran (*prosesor or transformator*)
- 6) Setiap sistem memiliki mekanisme kontrol dengan memanfaatkan umpan balik. Dengan demikian setiap sistem mempunyai kemampuan untuk mengatur dirinya sendiri dan menyusaikan diri dengan lingkungannya.

Dengan ciri umum ini jelas, bahwa inti dari sistem adalah berorientasi pada tujuan dan perilakunya atau segala kegiatannya bertujuan. Maka secara umum tujuan sistem adalah menciptakan atau mencapai sesuatu yang berharga, sesuatu yang mempunyai nilai.

B. PENGERTIAN POLITIK

Politik berasal dari kata “*polis*” yang berarti negara dan “*Taia*” berarti urusan.

Adapun kata politik berasal dari bahasa Yunani polis yang artinya negara-kota. Dalam negara kota pada zaman Yunani, orang saling berinteraksi satu sama lain untuk mencapai kesejahteraan (kebaikan, menurut Aristoteles) dalam hidupnya. Ketika manusia mencoba untuk menentukan posisinya dalam masyarakat, berusaha meraih kesejahteraan pribadi melalui sumber daya yang ada, atau berupaya memengaruhi orang lain agar menerima pandangannya, mereka sibuk dengan kegiatan yang dinamakan politik.

A New Handbook of Political Science menyebutkan bahwa politik adalah the constrained use of social power (penggunaan kekuasaan sosial yang dipaksakan).² Kata “kekuasaan sosial” ditekankan untuk membedakannya dengan “kekuasaan individual.” Ini karena politik berkenaan dengan pengaturan hidup suatu masyarakat secara keseluruhan. Masyarakat yang mengesahkan sekelompok individu untuk memiliki “kekuasaan sosial” yang aplikasinya “dapat dipaksakan” atas setiap individu untuk menjamin keteraturan dalam masyarakat itu sendiri.

Agar lebih jelas, berikut ini definisi politik dari Gabriel A. Almond et.al., yang mendefinisikannya sebagai: “... *the activities associated with the control of public decisions among a given people and in a given territory, where this*

control may be backed up by authoritative and coercive means. Politics refers to the use of these authoritative and coercive means—who gets to employ them and for what purposes.” “... kegiatan yang berhubungan dengan kendali pembuatan keputusan publik dalam masyarakat tertentu di wilayah tertentu, di mana kendali ini disokong melalui instrumen yang sifatnya otoritatif (berwenang secara sah) dan koersif (bersifat memaksa). Politik mengacu pada penggunaan instrumen otoritatif dan koersif ini—siapa yang berhak menggunakannya dan dengan tujuan apa.”

Definisi lain politik pada masa modern juga dicatat oleh Hamid bahwa: “... modern definition of politics, however, covers the government of the state and that of other human organizations, where “government” means organized authority and implies the institutions of leadership and authoritative allocation of values.”

“...Definisi politik pada masa modern mencakup pemerintah suatu negara dan organisasi yang didirikan manusia lainnya, di mana “pemerintah” adalah otoritas yang terorganisasi dan menekankan pelembagaan kepemimpinan serta pengalokasian nilai secara otoritatif.”

Kata otoritatif merupakan konsep yang ditekankan dalam masalah politik. Otoritatif adalah kewenangan yang absah, diakui oleh seluruh masyarakat yang ada di suatu wilayah untuk menyelenggarakan kekuasaan. Otoritas tersebut ada di suatu lembaga bernama “pemerintah”. Bukan suatu kekuasaan politik jika lembaga yang melaksanakannya tidak memiliki otoritas. Pemerintah juga dapat kehilangan otoritasnya tatkala mereka sudah tidak memiliki kekuasaan atas masyarakatnya. Pemerintahlah yang mengalokasikan nilai-nilai, seperti kesejahteraan, keadilan, keamanan, kebudayaan, dan sejenisnya ke tengah masyarakat. Dengan kekuasaan politik, pemerintah dapat memaksakan tindakannya atas setiap individu.

Andrew Heywood sekurangnya mengajukan empat asumsi jika “politik” diucapkan. Keempat asumsi ini sama-sama diyakini sebagai konteks situasi tatkala kata politik disebutkan kendatipun memiliki objek kajian yang berbeda. Keempat asumsi tersebut adalah sebagai berikut.

1. Politik sebagai seni pemerintahan, yaitu politik adalah penerapan kendali dalam masyarakat melalui pembuatan dan pemberdayaan keputusan kolektif. Asumsi ini adalah yang paling tua dan telah berkembang sejak masa Yunani Kuno.

2. Politik sebagai hubungan publik. Aristoteles dalam bukunya *Politics* menyatakan bahwa manusia adalah binatang politik. Maknanya, secara kodrati, manusia hanya dapat memperoleh kehidupan yang baik melalui komunitas politik. Lalu, dilakukan pembedaan antara lingkup “publik” dan “privat.” Kedua lingkup tersebut diperbesar menjadi state (kembangan publik) dan *civil society* (kembangan privat). Dalam “state” terletak institusi, seperti pengadilan, aparat pemerintah, polisi, tentara, sistem kesejahteraan sosial, dan sejenisnya, sedangkan dalam “civil society” terletak institusi, seperti keluarga, kekerabatan, bisnis swasta, serikat kerja, klub-klub, komunitas, dan sejenisnya. Masalahnya, masing-masing entitas dalam “*civil society*” cenderung mengedepankan kepentingannya sendiri yang kadang-kadang berbenturan dengan entitas civil society lainnya. Dengan demikian, muncullah konsep “state” untuk memoderasi dan meregulasi entitas-entitas sipil tersebut. Dalam konteks hubungan “*state-civil society*” inilah asumsi kedua politik diletakkan.
3. Politik sebagai kompromi dan konsensus. Sharing atau pembagian kekuasaan adalah asumsi politik sebagai kompromi dan konsensus. Kompromi dan konsensus dilawankan dengan brutalitas, pertumpahan darah, dan kekerasan. Dalam politik, tidak ada pihak yang kepentingannya terselenggarakan 100%. Masing-masing memoderasi tuntutan agar tercapai persetujuan satu pihak dengan pihak lain. Politik suatu negara dianggap baik bilamana masalah pergesekan kepentingan diselesaikan melalui kompromi dan konsensus di atas “meja”, bukan pertumpahan darah.
4. Politik sebagai kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau kelompok untuk memengaruhi orang atau kelompok lain dalam menuruti kehendaknya. Dalam konteks politik, kekuasaan yang dirujuk adalah kekuasaan sosial, yaitu produksi, distribusi, dan penggunaan sumber daya suatu masyarakat. Dalam asumsi ini, politik dilihat sebagai penggunaan “kapital” (yaitu kekuasaan) dalam konteks produksi, distribusi, dan penggunaan sumber daya tersebut. Politik adalah interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka proses pembuatan kebijakan dan keputusan yang mengikat kebaikan bersama masyarakat yang tinggal dalam wilayah tertentu. Menurut penulis, sistem politik adalah sekumpulan pendapat, prinsip, yang membentuk satu kesatuan yang berhubungan satu sama lain untuk mengatur pemerintahan serta

melaksanakan dan mempertahankan kekuasaan dengan cara mengatur individu atau kelompok individu satu sama lain atau dengan negara dan hubungan negara dengan negara. Sistem politik menurut Rusadi Kartaprawira adalah mekanisme atau cara kerja seperangkat fungsi atau peranan dalam struktur politik yang berhubungan satu sama lain dan menunjukkan suatu proses yang langgeng.

Menurut Gabriel A. Almond dan Powell Jr. dalam *World Politics*, Easton adalah seorang sarjana politik pertama yang menulis politik dalam istilah “sistem” secara eksplisit,⁶ sekalipun upaya mengaitkan konsep sistem dengan pemahaman politik sudah sejak lama dilakukan. Salah satunya adalah Max Weber yang membuat klasifikasi masyarakat dalam sistem kewenangan, tradisional, kharismatik, dan legal rasional, yang semuanya berhubungan dengan persoalan sistem sebagai konsep dan pemahaman politik.

Karl Marx juga melakukan pengklasifikasian masyarakat berdasarkan model produksi dan hubungan produksi yang berwujud berbagai kelas sosial, yaitu feodal, borjuis, dan proletar. Meskipun penjelasan Marx menekankan pada aspek ekonomi sebagai faktor yang menentukan aspek sosial yang lain, keberadaan kelas tersebut tidak terlepas dari persoalan hubungan politik dan sosial-budaya yang menyertainya.

Dalam karyanya yang lain *A Framework for Political Analysis* (1965) dan *A System Analysis of Political Life* (1965), Chilcote menyebutkan bahwa Easton mulai mengembangkan serta memerinci konsep-konsep yang mendukung karya sebelumnya –penjelasannya yang abstrak, dengan mencoba mengaplikasikannya pada kegiatan politik konkret dengan menegaskan hal-hal berikut.

1. Masyarakat terdiri atas seluruh sistem yang ada di dalamnya serta bersifat terbuka. Sistem politik adalah seperangkat interaksi yang diabstraksikan dari totalitas perilaku sosial, tempat nilai-nilai dialokasikan ke dalam masyarakat secara otoritatif. Kalimat ini sekaligus merupakan definisi politik dari Easton; dan lingkungan terdiri atas intrasocietal dan extrasocietal. Lingkungan intrasocietal terdiri atas lingkungan fisik serta sosial yang terletak di luar batasan sistem politik, tetapi masih dalam masyarakat yang sama. Lingkungan intrasocietal terdiri atas lingkungan ekologis (fisik, nonmanusia). Contoh lingkungan ini adalah kondisi geografis wilayah yang didominasi, misalnya oleh pegunungan, maritim, padang pasir, iklim tropis ataupun dingin.

2. Lingkungan biologis (berhubungan dengan keturunan ras). Contoh lingkungan ini adalah Semitic, Teutonic, Arianic, Mongoloid, Skandinavia, Anglo-Saxon, Melayu, Austronesia, Caucasoid, dan sejenisnya.
3. Lingkungan psikologis. Contoh lingkungan ini adalah postcolonial, bekas penjajah, maju, berkembang, terbelakang, ataupun superpower.
4. Lingkungan sosial. Contoh lingkungan ini adalah budaya, struktur sosial, kondisi ekonomi, dan demografis.
5. Lingkungan ekstrasosietal adalah bagian dari lingkungan fisik serta sosial yang terletak di luar batasan sistem politik dan masyarakat tempat sistem politik berada. Lingkungan extrasocietal terdiri atas sistem sosial internasional, contohnya adalah kondisi pergaulan masyarakat dunia, sistem ekonomi dunia, gerakan feminism, gerakan revivalisme Islam, dan sejenisnya, atau yang sekarang dikenal sebagai terminologi international regime (rezim internasional) yang sangat banyak variannya.

Easton mendefinisikan politik sebagai proses alokasi nilai dalam masyarakat secara otoritatif. Dikatakan secara otoritatif karena menjadikan konsep sistem politik Easton langsung berhubungan dengan negara.

Atas definisi Easton ini, Michael Saward menyatakan adanya konsekuensi-konsekuensi logis berikut:

1. bagi Easton hanya ada satu otoritas, yaitu otoritas negara;
2. peran dalam mekanisme output (keputusan dan tindakan) bersifat eksklusif, yaitu hanya di tangan lembaga yang memiliki otoritas;
3. Easton menekankan pada keputusan yang mengikat dari pemerintah, sehingga:
 - a. keputusan selalu dibuat oleh pemerintah yang legitimasinya bersumber dari konstitusi;
 - b. legitimasi keputusan oleh konstitusi dimaksudkan untuk menghindari chaos politik;
4. sangat penting bagi negara untuk selalu beroperasi secara legitimate.

Sejak awal hingga akhir perkembangannya, sekurang-kurangnya ada 5 pandangan tentang politik, yaitu:

1. Politik sebagai segala hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan pemerintah;
2. Politik sebagai segala kegiatan yang diarahkan untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam masyarakat.

3. Politik sebagai kegiatan yang berkaitan dengan perumusan dan pelaksanaan kebijakan umum
4. Politik sebagai konflik dalam rangka mencari atau mempertahankan sumber-sumber yang dianggap penting.

Salah satu fokus perhatian ilmu politik dalam masalah kekuasaan adalah:

1. Upaya memperoleh kekuasaan;
2. Mempertahankan kekuasaan;
3. Menggunaan kekuasaan;
4. Bagaimana menghambat penggunaan kekuasaan.

Adapun bidang kajian ilmu politik meliputi:

1. Teori ilmu politik, meliputi teori politik dan sejarah perkembangan ide-ide politik;
2. Lembaga-lembaga politik, meliputi UUD, pemerintahan nasional, pemda dan lokal, fungsi ekonomi dan sosial pemerintah dan perbandingan lembaga-lembaga politik;
3. Partai politik, meliputi organisasi kemasyarakatan, pendapat umum, partisipasi warga negara dalam pemerintahan dan administrasi;
4. Hubungan internasional, meliputi politik internasional, organisasi internasional, administrasi internasional, dan hukum internasional.

C. PENGERTIAN SISTEM POLITIK

Cakupan studi sistem politik pada dasarnya menunjuk pada seluruh lingkup aktivitas politik, yaitu membahas hubungan dan interaksi antara Lembaga-lembaga (suprastruktur politik: legislatif, eksekutif, dan yudikatif; dan infrastruktur politik; parpol, kelompok kepentingan, kelompok penekan, media komunikasi politik, dan tokoh politik) yang menjadi obyek bahasan dalam kegiatan atau usaha Lembaga-lembaga tersebut melaksanakan fungsi-fungsinya untuk menghasilkan *output* (misalnya dalam bentuk peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan) dari *input* (sekian alternatif yang ada yang berasal dari aspirasi rakyat ataupun dari luar sistem itu sendiri) agar dapat dicapai tujuan system itu. Seperti telah dijelaskan di atas, istilah sistem politik sering dipakai silih berganti dengan kata negara (*state*), pemerintahan (*government*), dan bangsa (*nation*). Padahal sistem politik tidak mempunyai makna yang sama dengan istilah-istilah tersebut yang hanya berguna untuk menggantikan aspek-aspek yang lebih terbatas atau spesifik dari politik.

Negara mempunyai mempunyai konotasi dengan kekhasan kelembagaan (*institution*), otoritas atau kewenangan (*authority*), legitimasi atau keabsahan (*legitimation*). Sedangkan pemerintah lebih berkenaan dengan institusi legal formal. Bangsa lebih merujuk pada sistem politik dimana warga negara mempunyai nasib dan perasaan identitas historis yang sama.

Selanjutnya, ada beberapa pendapat mengenai pengertian sistem politik yang perlu kita pahami. Berikut ini adalah beberapa yang dimaksud.

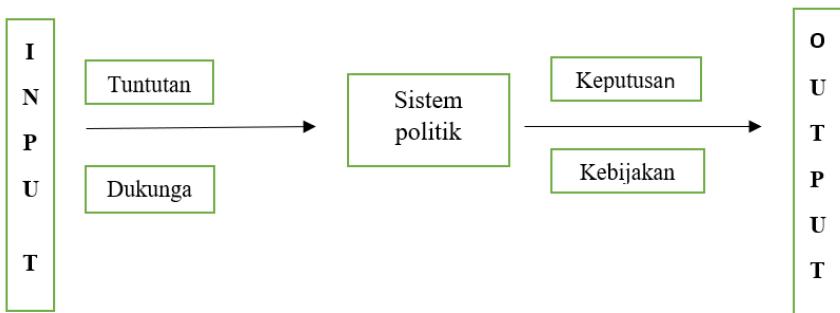
1. Davis Easton; sebagaimana yang disampaikan oleh Josept P. Kene, orang yang pertama yang menganalisa sistem politik secara eksplisit atau jelas dalam bukunya *The Political System*, mendefenisikan bahwasannya:
 - a. Sistem politik terdiri dari alokasi nilai-nilai (dengan cara kebijakan)
 - b. Pengalokasian nilai-nilai tersebut bersifat paksaan atau dengan kewenangan
 - c. Pengalokasian tersebut mengikat masyarakat secara keseluruhan.Easton juga berpendapat bahwa sistem politik dapat diperkenalkan sebagai interaksi yang diabstarksikan dari seluruh tingkah laku sosial, melalui mana nilai-nilai dialokasikan secara otoritatif kepada masyarakat. Dalam pengertian sempit, menurut Easton, sistem politik adalah peraturan perundang-undangan yang memiliki kewenangan untuk ditaati dan diikuti. Kemudian bersifat mengikat masyarakat politik sebagai sebuah produk dari sistem politik.
2. Robert Dahl; sistem politik ialah pola yang tetap dari hubungan manusia yang melibatkan makna yang luas dari kekuasaan, aturan-aturan dan kewenangan. Dengan demikian sistem politik menurut Robert Dahl mencakup dua hal, yaitu (1) pola yang tetap dari hubungan antar manusia; dan (2) melibatkan sesuatu yang luas dan berarti tentang kekuasaan, aturan-aturan dan kewenangan.
3. Sukarna; sistem politik adalah suatu tata cara untuk mengatur dan mengelola strategi memperoleh kekuasaan di dalam negara, mempertahankan kedudukan kekuasaan dalam negara, mengatur hubungan pemerintahan dengan rakyat atau sebaliknya dan mengatur hubungan antara negara dengan negara, atau dengan rakyatnya, atau secara singkat dapat dikatakan bahwa sistem politik merupakan tata cara mengatur negara. Maka kesimpulannya bahwa sistem politik adalah: Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sistem politik adalah

- a. *Secara etimologis, sistem politik* adalah suatu keseluruhan yang tersusun dari sekian banyak bagian yang berkaitan dengan urusan negara. sekumpulan unsur-unsur yang saling berhubungan, saling bekerjasama dan saling mempengaruhi satu sama lain serta terikat rencana yang sama untuk mencapai tujuan tertentu dalam lingkungan yang kompleks.
- b. kumpulan elemen/unsur yang satu sama lain saling terkait dalam urusan negara yang bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama.
- c. proses kegiatan dan pola yang tetap dari hubungan serta mekanisme kerja antara inprastruktur politik dan suprastruktur politik dalam mengambil keputusan bersama yang mengikat

Sementara, pengertian sistem politik pertama-tama dapat dipahami sebagai suatu sistem hubungan antara manusia dalam suatu negara. Sistem hubungan di atas dipolakan, dalam arti dilembagakan, melalui peraturan-peraturan dan didalamnya ditetapkan adanya lingkungan kekuasaan dan lingkungan kewenangan.

Hal terpenting lainnya yang tak boleh luput dari ingatan adalah bahwa sistem politik menunjukkan adanya:

1. Pola yang tetap dari hubungan antara manusia, yang dilembagakan dalam bermacam-macam badan politik berupa suprstruktur politik (eksekutif, legislatif dan yudikatif) maupun badan infrastruktur politik (parpol, kelompok kepentingan, kelompok penekan, alat komunikasi politik, dan tokok politik)
2. Kebijakan yang mencakup pembagian atau pendistribusian barang-barang meterial dan inmateril untuk menjamin kesejahteraan. Atau membagikan dan mengalokasikan nilai-nilai negara secara singkat,
3. Penggunaan kekuasaan atau kewenangan untuk menjalankan paksaan fisik secara legal
4. Fungsi integrasi dan adaptasi dalam masyarakat secara ke dalam maupun ke luar.



Gambar: Analisa Sistem Politik

(Sumber: Mohtar Mas'oed dan Colin MacAndrews (Eds), op.cit, 2004, h.5)

Dalam gambar di atas, juga tampak bahwa Easton memisahkan sistem politik dengan masyarakat secara keseluruhan, karena menurut Easton sistem politik adalah suatu system yang berupaya mengalokasikan nilai-nilai di tengah masyarakat secara otoratif, dan ini hanya dilakukan oleh Lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan. Suatu sistem politik bekerja untuk menghasilkan suatu keputusan (*secision*) dan Tindakan (*action*) yang disebut (*policy*) guna mengalokasikan nilai.

Sementara itu, menurut Amond, sistem politik modern maupun primitive memiliki ciri-ciri, yaitu:

1. Semua sistem politik termasuk yang paling sederhana mempunyai kebudayaan politik. Dalam pengertian bahwa masyarakat yang paling seerhana pun mempunyai tipe struktur politik yang terdapat dalam masyarakat yang paling kompleks sekalaipun. Tipe-tipe tersebut dapat dibandingkan satu sama lain sesuai dengan tingkatan dan bentuk pembidangan kerja tertentu.
2. Semua sistem politik menjalankan fungsi-fungsi yang sama walupun tingkatannya berbeda-beda yang ditimbulkan oleh adanya perbedaan struktur. Hal ini dapat diperbandingkan, yaitu bagaimana fungsi-fungsi itu tadi saring dilaksanakan atau tidak bagaimana gaya pelaksanaannya.
3. Semua struktur politik bagaimanapun juga dispesialisasikan kepada masyarakat primitive maupun modern yang melaksanakan banyak fungsi. Sehingga sistem politik dapat memperbandingkan sesuai dengan tingkatan khususnya tugas.
4. Semua sistem politik merupakan sistem campuran dalam pengertian kebudayaan. Secara rasional tidak ada struktur dan kebudayaan yang

BAB II

STRUKTUR SISTEM POLITIK

Kehidupan politik suatu negara terlihat dari sistem politik yang mewujudkan dalam struktur politik. Dan, dalam setiap sistem politik akan ditemui berbagai struktur politik. Struktur politik sebagai bagian dari struktur pada umumnya, selalu berkenaan dengan alokasi nilai-nilai yang bersifat otoritatif, yaitu dipengaruhi oleh distribusi atau penggunaan kekuasaan. Struktur politik yang umumnya terdapat dalam sistem politik dari setiap negara meliputi dua struktur kehidupan politik yakni, supra struktur politik dan infrastuktur politik.

Dalam konteks ini, kekuasaan pada pembicaraan sistem politik menurut Ossip K. Flectheim dibagi dua jenis (vertikal dan struktural), yang pertama, kekuasaan yang ditujukan kepada negara, dan kedua, kekuasaan yang ada di dalam negara. Pembagian kekuasaan ini dipandang dari pendekatan struktural fungsional Almond, yaitu: (1) kekuasaan yang ditujukan kepada negara identik dengan infrastruktur politik; dan (2) kekuasaan yang ada di dalam negara sama dengan suprastruktur politik.

Sejalan dengan hal ini, Sri Sumantri mengemukakan bahwa sistem politik adalah sistem hubungan antara manusia yang dilembagakan dalam bermacam-macam dan politik, berupa suprastruktur politik maupun infrastruktur politik serta hubungan satu dengan lainnya. Pembahasan berikut akan menjelaskan kedua hal tersebut.

A. PENGERTIAN STRUKTUR POLITIK

Struktur politik berasal dari dua kata yaitu, struktur dan politik, Struktur berarti badan atau organisasi, sedangkan politik berarti urusan negara. Jadi secara harfiah, struktur politik adalah badan atau organisasi yang berkenaan dengan urusan negara. Untuk itu, Struktur politik selalu berkenaan dengan

alokasi nilai-nilai yang bersifat otoritatif, yaitu dipengaruhi oleh distribusi serta penggunaan kekuasaan.

Selain itu, Struktur politik dapat merupakan bangunan yang tampak secara jelas dan yang tidak tampak secara jelas. Struktur politik tidak dapat dilepaskan dari fungsi politik, Yaitu *input*, *output*, *conversi*, dan *feedback*. Struktur politik tertentu kerap merupakan refleksi tuntutan budaya politik atau hasil interaksi antara struktur politik internal atau ditentukan output dan bahkan oleh ujian-ujian dalam proses politik, dalam masa yang akan datang.

Jika dalam kajian politik senantiasa dibahas masalah kekuasaan, maka kata kekuasaan tersebut hendaknya diberi makna secara netral. Artinya, kekuasaan tidak dilihat sebagai sesuatu yang baik atau sesuatu yang buruk; bahwa baik buruk kekuasaan tergantung pada etika oaring atau Lembaga yang memegang kekuasaan, yaitu tergantung pada penerapannya. Kekuasaan harus diberi arti sebagai suatu kapasitas, kapabilitas, atau kemampuan untuk mempengaruhi, meyakinkan, mengendalikan, menguasai dan memerintah orang lain. Kapasitas demikian erat hubungannya dengan wewenang, hak dan kekuatan fisik. Dari uraian di atas , jelas terlihat adanya hubungan antara kekuasaan dengan kekuatan fisik, walaupun bisa jadi, penggunaan kekuasaan fisik itu baru dipakai sebagai cara terakhir. Dengan demikian, Struktur politik meliputi struktur hubungan antara manusia dengan manusia maupun struktur hubungan antara manusia dengan negara (pemerintah). Yang jelas, kekuasaan diperlukan atau bahkan merupakan hal yang harus ada dalam penyelenggaraan kehidupan politik. Hal demikian dikarenakan, hanya dengan kekuasaan suatu sistem politik akan muncul suatu kebijakan yang dapat mengikat seluruh warga negara.

Keputusan atau kebijakan adalah fokus utama dari politik itu sendiri. Keputusan yang dimaksud adalah keputusan yang menyangkut kepentingan seluruh masyarakat. Keputusan bersifat mengikat dan dapat dipaksakan pemberlakuan. Dalam pengertian lain, keputusan adalah kekuasaan untuk mengatur yang dilakukan oleh negara terhadap masyarakat. Pengaturan yang dimaksud berupa kebijakan (*output*) yang termasuk di dalamnya adalah proses perumusan/pembuatan kebijakan yang melibatkan berbagai macam kepentingan.

Dengan meminjam istilah MacIver, kekuasaan menyelenggarakan segala kepentingannya, negara memerlukan kekuasaan tersebut. Bahkan bukan hanya dalam kajian politik, dalam ilmu sosial secara umum kekuasaan

merupakan hal yang sifatnya mendasar., Seperti yang dinyatakan Bertrand Russel, konsep mendasar dalam ilmu sosial adalah kekuasaan, sepertinya halnya energi dalam ilmu alam, tanpa energi, takkan sesuatu yang terjadi.

Struktur politik suatu negara sekaligus menggambarkan susunan kekuasaan dalam suatu negara. Dalam susunan kekuasaan itu, tampak kewenangan setiap lembaga yang ada dan bagaimana hubungannya satu sama lain sehingga mewujudkan sebuah sistem yang menghasilkan kebijakan yang sifatnya otoritatif. Ada Lembaga yang menjalankan fungsi masukan berupa dukungan dan aspirasi, ada yang menjalankan fungsi mengeloh masukan tersebut menjadi keluaran (output) berupa segala bentuk kebijakan pemerintah.

Unit dasar struktur politik adalah peran individu. Peran merupakan pola-pola perilaku yang teratur, yang ditentukan oleh harapan dan tindakan sendiri dan orang lain. Struktur senantiasa melibatkan fungsi-fungsi politik maka pendekatan yang digunakan biasa disebut sebagai struktural fungsional. Menurut Almond dan Powell Jr., struktur politik dapat dibedakan ke dalam sistem, proses, dan aspek-aspek kebijakan. Struktur sistem merujuk pada organisasi dan institusi yang memelihara atau mengubah (*Maintain or Change*) struktur politik dan secara khusus struktur menampilkan fungsi-fungsi berikut.

1. Fungsi-fungsi sosialisasi politik merupakan fungsi mengantarkan generasi muda dan anak-anak untuk mendapat sosialisasi kehidupan politik dari berbagai institusi, seperti keluarga, tempat-tempat ibadah, lingkungan kerja, sekolah, dan sebagainya.
2. Rekrutmen politik melibatkan proses perekrutan pemimpin-pemimpin politik melalui partai-partai politik. Komunikasi politik menjadi penyambung bagi keseluruhan sistem agar dapat bekerja sebagaimana mestinya. Tanpa adanya komunikasi politik, energi yang berada dalam elemen-elemen sistem politik tidak dapat mengalir. Akibatnya, sistem politik mengalami kemacetan. Struktur proses politik melibatkan fungsi artikulasi kepentingan, agregasi kepentingan, pembuatan kebijakan, dan implementasi kebijakan dilaksanakan oleh struktur politik.

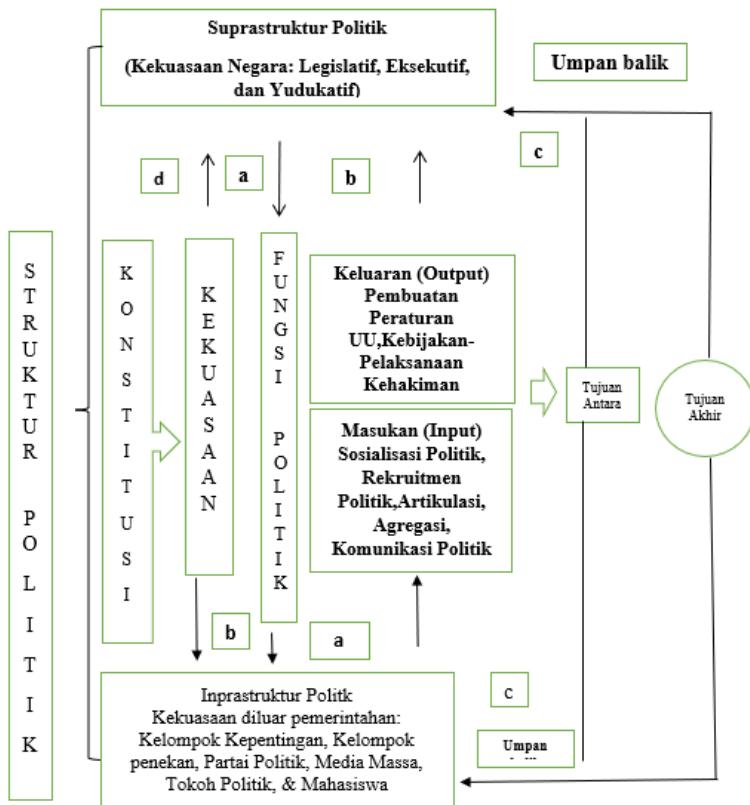
Struktur proses melibatkan berbagai kelompok ke pentingan, partai politik, media massa, eksekutif, dan sebagainya, dan setiap struktur ini mempunyai peran politik masing-masing. Selanjutnya, jika struktur proses dapat dipahami sebagai bagian dari isi kebijakan-kebijakan publik yang spesifik atau, setidaknya, seolah-olah fungsi-fungsi proses dilakukan oleh

struktur-struktur yang sama untuk semua kebijakan, struktur kebijakan lebih pada kebijakan-kebijakan spesifik, seperti kebijakan pertahanan, kebijakan pangan, dan sebagainya.

Secara umum, struktur yang terdapat dalam suatu sistem politik terdiri atas kelompok-kelompok kepentingan, partai politik, badan legislatif, eksekutif, birokrasi, dan badan-badan peradilan, Selanjutnya, ada pula yang memilih struktur politik menjadi informal dan formal. Yang termasuk dalam struktur politik informal sebagai berikut:

1. Pengelompokan masyarakat atas dasar persamaan social ekonomi seperti golongan tani, buruh, kelas menengah, dan kelompok cendikiawan.
2. Pengelompokan atas dasar perbedaan cara, gaya disatu pihak dengan pengelompokan atas dasar kesadaran akan adanya persamaan jenis-jenis tujuan di pihak lain. Termasuk dalam pengelompokan ini, misalnya, adalah golongan-golongan sosial politik, golongan agama, kelompok militer dan golongan pengusaha.
3. Pengelompokan atas dasar kenyataan dalam kehidupan politik rakyat. Masing-masing pengembang fungsi dan peranan politik tertentu yang secara konvensional disebut dalam sistem politik. Termasuk dalam pengelompokan ini, misalnya, adalah parpol, golongan kepentingan, golongan penekan, media komunikasi politik, dan tokoh politik yang terorganisasikan dalam sebuah organisasi tertentu, tetapi berbeda dengan organisasi tertentu, tetapi berbeda dengan struktur politik pemerintah.

Sedangkan, struktur politik formal terdiri atas Lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif, kepolisian, dan kelompok birokrasi. Selanjutnya, konsep suprastruktur politik maupun infrastruktur politik tersebut, sebagai sebuah bagian system politik, sebagai berikut:



Gambar: Struktur Politik dalam Aliran Model Sistem Politik

Penjelasan Gambar:

Fungsi politik menyebabkan *struktur politik* hidup dalam menjalankan segala aktivitas politik (suprastruktur politik dan infrastruktur politik). Keduanya berkolerasi secara timbal balik dan obyatif (lihat hubungannya ditandai dengan tanda panah a dan b). Aktivitas tersebut berupaya mencapai tujuan yang bersifat *antara* dan *akhir*. Pencapaian tujuan ini merupakan umpan balik bagi struktur (panah c) untuk aktivitas lanjutan. Untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi tersebut diperlukan kekuasaan. *Kekuasaan* bersumber dari *konstitusi* yang juga menetapkan struktur politik dan fungsi-fungsinya (panah d).

DAFTAR PUSTAKA

- Alfian. 1971. Beberapa Masalah Pembaharuan Politik di Indonesia. Jakarta: LEKNAS.
- Ali, Hasymi. 1995. Organisasi dan Manajemen. Jakarta: Bumi Aksara.
- Almond, Gabriel. 1965. Studi Perbandingan Sistem Politik. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. .
- 1974. "Sosialisasi, Kebudayaan, dan Partisipasi Politik". Dalam Mohtar.
- Amir, Makmur dan Purnomowati Dwi Reni. 2005. Lembaga Perwakilan Rakyat. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara FHUI.
- Amirin, Tatang. 1996. Pokok-pokok Teori Sistem. Jakarta: Rajawali Pers.
- Budiardjo, Mariam. 1972. Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta: Dian Rakyat. .
- 1975. Masalah Kenegaraan. Jakarta: Gramedia.
- Bulkin, Farhan. 1985. Analisa Kekuatan Politik di Indonesia. Jakarta: LP3ES.
- Dwiyanto, Agus dkk. 2002. Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia. Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Yogyakarta.
- Eston, David. 1988. Kerangka Kerja Analisa Sistem Politik. Alih Bahasa Simamora Sahat. Jakarta: Bina Aksara.
- Gaffar, Afan. 1997. Menampung Partisipasi Politik Rakyat. JSP. Volume 1. Nomor 1. . 2006. Politik Indonesia, Transisi Menuju Demokrasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Garna, Judistira K. 1996. Ilmu Sosial Dasar Konsep-Posisi. Bandung.
- Harun, Rochajat, Sumarno A.P. 2006. Komunikasi Politik sebagai Suatu Pengantar. Bandung: Mandar Maju.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2000. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bumi Aksara.
- Huntington, Samuel. 2003. Tertib Politik pada Masyarakat yang Sedang Berubah. Edisi Terjemahan. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Imawan, Riswandha. 2000. "Reformasi Politik dan Demokratisasi Bangsa". Dalam Selo Soemarjan. Menuju Tata Indonesia Baru. Jakarta: Gramedia.
- Isjwara. 1982. Pengantar Ilmu Politik. Bandung: Bina Cipta.
- Kantaprawira, Rusadi. 1990. Pendekatan Sistem dalam Ilmu Sosial: Aplikasi dalam Meninjau Kehidupan Politik Indonesia. Bandung: Sinar Baru.
- 2006. Sistem Politik Indonesia, Suatu Model Pengantar. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Kleden, Ignas. 2003. Indonesia Setelah Lima Tahun Repormasi Analisis CSIS.
- Kuffal. 2005. Himpunan Sembilan Undang-Undang. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Kusnardi, Moch dan Saragih R. Bintas. 2000. Ilmu Negara. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Mohtar, Mas'oed dan Andrew Mac Colin. 2000. Perbandingan Sistem Politik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Nasroen, M. 1986. Asal Mula Negara. Jakarta: Aksara Baru.
- Rahardjo, Dawam. 1999. Orde Baru dan Orde Transisi, Wacana Kritis Penyalahgunaan Kekuasaan dan Krisis Ekonomi. Yogyakarta: UII Press.
- Rahman H.I.A. 2007. Sistem Politik Indonesia. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rahman, A., Syahrial dkk. 2000. Sosiologi dan Politik. Jakarta: Ghilia Indonesia. Rahmat, Jalaluddin. 2000. Komunikasi Politik Khalayak dan Efek. Bandung: Rosda Karya. Railon, Francois. 1985. Politik dan Ideologi Mahasiswa Indonesia: Pembentukan dan Konsolidasi Orde Baru 1966-1974. Jakarta: LP3ES. Richard, Daft L. 2002. Manajemen. Jakarta: Erlangga. Robbins, Stephen P. 1993. Organizational Behavior. New York: PrenticeHall, Englewood Cliffs. Rodee, Carlton Clymer dkk. 2000. Pengantar Ilmu Politik. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Siagian, Sondang P. 1993. Administrasi Pembangunan. Jakarta: Haji Mas Agung. .

- 1993. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bina Aksara..
- 1994. Patologi Birokrasi Analisis, Identifikasi, dan Terapinya. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Simon, Herbert A. 1976. Administrative Behavior. New Jersey: Free Press.
- Simorangkir. 1987. Hukum dan Konstitusi Indonesia. Jakarta: Gunung Agung.
- Snell, Bateman. 2002. Management Competing in the New Era. McGrawHill Companies.
- Soekanto, Soerjono. 2000. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soemardjan, Selo dan Soelaeman Soemantri. 1964. Setangkai Bunga Sosiologi. Jakarta: Fakultas Ekonomi UI.
- Sriyanti, Rahman A. dan Purwanto S.K. 2006. Etika Berwarganegara, Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi. Jakarta: Salemba Empat.
- Stoner, James A.F., Charles Wankel. 1978. Management. New Jersey: Prentice Hall International Englewood Cliffs.
- Subekti. 1985. Pokok-pokok Hukum Perdata. Jakarta: Intermasa.
- Sudarsono, Juwono. 1976. Pembangunan Politik dan Perubahan Politik. Jakarta: Gramedia.
- Sukarna. 1992. Sistem Politik Indonesia. Bandung: Mandar Maju.
- Suprapto, Johannes. 1998. Teknik Pengambilan Keputusan. Jakarta: Rineka Cipta.
- Surbakti, Ramlan. 2002. “Menuju Demokrasi Konstitusional Reformasi Hubungan dan Distribusi Kekuasaan”. Dalam Selo Soemarjan (ed.) Menuju Tata Indonesia Baru. Jakarta: Gramedia.
- Thoha, Miftah. 2003. Birokrasi dan Politik di Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Winardi, J. 2005. Pemikiran Sistemik dalam Bidang Organisasi dan Manajemen. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Winarno, Budi. 2008. Sistem Politik Indonesia Era Reformasi. Jakarta: Buku Kita. Young, Oran R. 1984. Sistem Ilmu Politik. Alih Bahasa Simamora Sahat. Jakarta: Bina Aksara.

PROFIL PENULIS



Dr. Suhardiman, S.Sos., M.Si., Lahir di Jeneponto 5 April 1972, Menamatkan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di desa kelahirannya di Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto, Menyelesaikan pendidikan S1 Administrasi Negara FISIP Univ. Muhammadiyah Makassar 1997. Menyelesaikan Program Magister Administrasi Publik PPs Ilmu Administrasi Publik Unmul Samarinda 2008 dan Doktor Ilmu Administrasi Publik di FISIPOL UNTAG 1945 Surabaya tahun 2024. Sehari-hari mengajar di Program Studi Administrasi Publik, FISIPOL, dan beberapa Program Studi di Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Peneliti bidang sosial, politik dan pemerintahan, memenangkan hibah Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat oleh Kementerian Dikti Saintek. Dan telah mempublikasikan artikel ilmiah yang diterbitkan di jurnal terindeks SCOPUS, Google Scholar dan SINTA, dengan kepakaran Local Government, Selain itu aktif menjadi pembicara di forum-forum ilmiah, seminar, pelatihan dan bimbingan teknis. Suhardiman dihubungi melalui email: suhardiman0572@gmail.com



Jamiah, S.Sos., M.Si memperoleh Sarjana Ilmu Administrasi Negara Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, Magister Ilmu Administrasi Negara Universitas Mulawarman Samarinda, Merupakan dosen Tetap Yayasan Pendidikan 17 Agustus 1945 Samarinda. Telah mempublikasikan Artikel Ilmiah Google Scholar dan SINTA dengan fokus kajian Administrasi Publik, Aktif dalam kegiatan Workshop, Seminar skala regional dan Nasional, Bimbingan Teknik Application Approach (AA). Jamiah dihubungi melalui email: jamiah@untag-smd.ac.id



Sistem Politik **Indonesia**

Sistem politik bagi setiap bangsa merupakan “jantung” yang menjadi roh bagi keberlangsungan kehidupan bangsa dan negara. Jika jantungnya rusak, keberlangsungan kehidupan jiwa akan terancam. Begitu pun sistem politik Indonesia menjadi roh bagi kehidupan bangsa dan negara. Jika rusak sistem politiknya, roda pemerintahan negara Indonesia tidak akan berjalan lancar. Sebaliknya, jika rohnya baik, roda pemerintahan pun akan berjalan dengan baik. Mewujudkan sistem politik yang baik bukanlah hal mudah karena memerlukan proses yang cukup panjang dan harus ditanamkan sejak dini kepada kalangan generasi muda. Hal ini karena mereka merupakan aset bangsa yang akan mewarisi tonggak kepemimpinan sebagai estapet dari para generasi tua. Tanpa dijejali dan dipupuk sejak awal tidak akan tercipta generasi yang benar-benar mempunyai kualitas memumpuni sebagai harapan bangsa dan negara pelanjut generasi tua.

Buku ini berusaha memberikan pencerahan tentang pendidikan politik bagi kalangan intelektual muda, khususnya (mahasiswa) sebagai sarana dasar dalam pendidikan politik. Dengan demikian, mereka akan siap masuk ke kancah dunia politik yang sebenarnya dalam tataran lingkup pemerintahan. Adapun bagi pelaku pemerintahan, buku ini dapat menjadi bahan referensi untuk menambah cakrawala berpikir dan bertindak dalam menjalankan roda pemerintahan



CV. Tahta Media Group
Surakarta, Jawa Tengah
Web : www.tahtamedia.com
Ig : tahtamediagroup
Telp/WA : +62 896-5427-3996

